

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 25 September 2014

Subyek : Iklim

Hal : 14

DUNIA PERLU ARAH BARU HADAPI PERUBAHAN IKLIM : PERKUAT MITIGASI, ADAPTASI, DAN RENCANA PENERAPAN

Perubahan iklim telah menjadi isu utama abad ini dan wajah dunia sekarang. Respons global terhadap ancaman dampak perubahan iklim akan menentukan masa depan dunia. Dua negara utama dalam isu perubahan iklim, Amerika Serikat dan Tiongkok, siap mengambil tanggung jawab memimpin dunia.

Pada Pertemuan Puncak Perubahan Iklim di New York, AS, yang berlangsung sehari, 120 pemimpin negara dan sejumlah perusahaan besar hadir menetapkan strategi menghadapi perubahan iklim. Demikian dilaporkan wartawan Kompas, M Zaid Wahyudi dan Suhartono, dari New York, Selasa (23/9).

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi pembicara keempat tentang isu ekonomi dan sosial menyampaikan kebijakan kunci mengatasi perubahan iklim.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada pembukaan pertemuan itu menegaskan, hari itu sangat penting karena bisa membawa dunia pada arah baru. "Saya meminta Anda semua untuk memimpin," ujarnya di hadapan peserta pertemuan.

Banyak kalangan berharap pertemuan di New York melampirkan jalan bagi kesepakatan baru pada Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-21 Kerangka Kerja PBB mengenai Konvensi tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Paris, Perancis, 2015. Di Paris akan ditandatangani kesepakatan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai ganti Protokol Kyoto yang berakhir 2012.

Dua negara memimpin

Kemarin, untuk pertama kalinya Tiongkok dan AS berjanji (pledge) mengurangi emisi GRK. Sementara Presiden AS Barack Obama mengatakan telah berbicara dengan Wakil Perdana Menteri Tiongkok Zhang Gaoli dan mereka sepakat bertanggung jawab memimpin. Meski demikian, AS tidak akan menetapkan target penurunan emisi GRK-nya.

"Tiongkok akan berusaha keras mengatasi perubahan iklim dan mengambil tanggung jawab internasional yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan kami sekarang," ujar Zhang. AS dan Tiongkok sebelumnya saling menunggu terkait komitmen penurunan emisi nasionalnya.

Sementara itu, negara-negara Uni Eropa berjanji mengurangi 40 persen emisi GRK pada 2030 dibandingkan level emisi 1990. Lebih dari 150 negara anggota juga berjanji menghentikan penebangan hutan pada 2030.

Strategi Indonesia

Presiden Yudhoyono menegaskan dua elemen pendekatan dasar kebijakan Indonesia, yaitu kerja sama antarnegara dan aksi nasional yang memadai.

Pada konteks internasional, kata Yudhoyono, semua pihak harus berupaya intensif agar tercapai kesepakatan mengikat sesuai kerangka kerja 2020 kebijakan perubahan iklim.

“Kesepakatan harus dikaitkan pada mitigasi, adaptasi, dan kerangka kerja implementasinya,” ujar Presiden yang ditetapkan sebagai Ketua Pertumbuhan Hijau Global tingkat internasional.

Strategi Indonesia yang pertama adalah menepati janji mengurangi 26 persen emisi GRK dari level tanpa ada intervensi (business as usual/BAU) pada 2020. Kedua, mengurangi emisi GRK dari deforestasi dan degradasi lahan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar hutan serta fokus pada upaya eksplorasi potensi ekosistem karbon biru sebagai upaya menahan kenaikan 2 derajat celsius suhu bumi. Selanjutnya, Indonesia turut menandatangani Amandemen Doha dan Protokol Kyoto.

Menyikapi pidato Yudhoyono, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengatakan, kemampuan Indonesia menyerap karbon di hutan dan laut memang luar biasa. Namun, yang mengelola hutan dan laut tetap terjaga adalah masyarakat adat. Jika ingin mencapai target, pengakuan dan pengukuhan hak masyarakat adat atas wilayahnya, baik di darat maupun laut, adalah mutlak.